

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI

Moh. Rifaldi ^{1*}; Mahfuzat ²; Rusmawaty Rusdin ³;

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mrif8917@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mahfuzat.lamakampali@gmail.com

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rusmawatyrusdin2025@gmail.com

* Correspondence : mrif8917@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Collaborative governance, Pengelolaan Sampah*

Received : Desember 2025

Revised : Januari 2026

Accepted : Februari 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan sampah akibat aktivitas industri dan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengelolaannya. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Kecamatan Bahodopi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan informan yang meliputi pemerintah kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, PT IMIP, dan masyarakat, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan efektif pada tingkat strategis melalui dialog tatap muka yang inklusif, pembangunan kepercayaan berbasis transparansi dan komitmen sumber daya, serta komitmen aktor sesuai kapasitas masing-masing, namun pada tingkat operasional masih menghadapi kendala berupa lemahnya pemahaman bersama di masyarakat dan tidak berkelanjutannya hasil antara akibat tidak optimalnya sistem pengangkutan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah sangat bergantung pada kemampuan para aktor dalam menyelaraskan perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional di lapangan, serta memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan pengelolaan sampah kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the Collaborative governance process in waste management in Bahodopi District, Morowali Regency, which is motivated by the increasing waste problem due to industrial activities and limited government capacity in its management. The study used a descriptive qualitative design and was conducted in Bahodopi District, Central Sulawesi Province, with informants including the sub-district government, the Environmental Agency, PT IMIP, and the community, and data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that collaboration is effective at the strategic level through inclusive face-to-face dialogue, transparency-based trust building and resource commitment, and actor commitment according to their respective capacities, but at the operational level it still faces obstacles in the form of weak mutual understanding in the community and unsustainable intermediate results due to the suboptimal waste transportation system. This

study concludes that the success and sustainability of Collaborative governance in waste management are highly dependent on the ability of actors to align strategic planning with operational implementation in the field, and provides important implications for strengthening more effective and sustainable collaborative waste management policies.

Pendahuluan

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang melibatkan proses dan struktur pengambilan keputusan publik melalui keterlibatan berbagai aktor lintas lembaga pemerintah, tingkat pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani permasalahan publik yang kompleks (Bryson, Crosby and Stone, 2015). Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi berkelanjutan, pembangunan kepercayaan, serta kerja sama antar pemangku kepentingan untuk mencapai hasil kebijakan yang berkelanjutan (Dudley and Xie, 2020). Selain itu, tata kelola kolaboratif juga berpotensi meningkatkan kinerja kebijakan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui proses pembelajaran bersama, pembentukan kepercayaan, dan interaksi yang intensif antar aktor (Chen and Neshkova, 2020).

Secara historis, *collaborative governance* berkembang seiring dengan pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*, di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelesaian masalah publik. Kompleksitas permasalahan publik, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta perkembangan teknologi dan sumber daya manusia menuntut keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, tata kelola kolaboratif membantu pemerintah mengatasi keterbatasan kapasitas dan waktu dalam menangani tantangan kebijakan yang kompleks (Hall, 2021).

Dalam praktiknya, proses tata kelola kolaboratif menghasilkan berbagai hasil antara (*intermediate outcomes*), seperti terbentuknya kepercayaan, pemahaman bersama, dan pembelajaran kolektif yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kolaborasi jangka panjang (Roberts, 2019). Salah satu sektor yang sangat membutuhkan pendekatan kolaboratif adalah pengelolaan sampah, mengingat kompleksitas aktor, tingginya volume limbah, serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Tantangan pengelolaan limbah memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan peran pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat setempat agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Wang *et al.*, 2020).

Permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi isu serius di Kabupaten Morowali, khususnya di Kecamatan Bahodopi. Berdasarkan fakta lapangan, volume sampah yang dihasilkan di wilayah ini mencapai sekitar 80 ton per hari. Dengan jumlah penduduk Kecamatan Bahodopi yang mencapai 44,5 jiwa, peningkatan volume sampah harian berpotensi menyebabkan tempat pembuangan akhir (TPA) mengalami kelebihan kapasitas apabila tidak dikelola secara optimal. Kondisi ini

berisiko menimbulkan penumpukan sampah yang semakin tinggi dan berdampak pada kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi tidak hanya berkaitan dengan tingginya volume sampah, tetapi juga mencakup keterbatasan infrastruktur pengumpulan dan pengolahan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta keterbatasan lahan TPA yang semakin menyempit. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbunan sampah di Kabupaten Morowali mencapai 31.107,13 ton per tahun (Jambeck *et al.*, 2015), Selain itu, peningkatan limbah kemasan plastik dari makanan dan minuman mencerminkan perubahan pola konsumsi dan berkembangnya budaya konsumerisme di masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian oleh (Mukus, Amaliatulwalidain and Kariem, 2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, pabrik sampah, dan masyarakat di Desa Tulung Selapan Timur berhasil mewujudkan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun demikian, (Bodin, 2017) menegaskan bahwa proses tata kelola kolaboratif dapat berkinerja buruk apabila partisipasi pemangku kepentingan lemah atau aktor-aktor yang terlibat kurang termotivasi untuk melakukan tindakan bersama. Penelitian lain oleh (Pundenswari *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa meskipun dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses telah dilakukan, pemahaman bersama antar aktor masih menjadi kendala akibat perbedaan persepsi. Sementara itu, (Puspita and Wahyudi, 2023) menyatakan bahwa metode tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dapat dinilai efektif apabila didukung oleh koordinasi yang kuat dan implementasi yang konsisten.

Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah melalui berbagai program seperti bank sampah induk, pusat daur ulang (PDU), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Program-program tersebut pada dasarnya berbasis kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pembagian peran, kewenangan, akuntabilitas, serta komitmen antar aktor yang terlibat. Mengingat pengelolaan bank sampah, PDU, dan TPS 3R di Kecamatan Bahodopi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, maka konsep *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Ansell dan Gash (2012) mengemukakan bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil antara. Dalam konteks Kecamatan Bahodopi, keterbatasan infrastruktur TPA dan TPS serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih menjadi faktor penghambat optimalisasi proses kolaborasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali memerlukan keterlibatan dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata dan bahasa tanpa menggunakan analisis statistik. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara komprehensif penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah, khususnya bentuk kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Informan penelitian berjumlah empat orang yang terdiri atas perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kecamatan Bahodopi, pihak perusahaan PT IMIP, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen, laporan, dan regulasi yang relevan, observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi dan praktik pengelolaan sampah, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, laporan, dan catatan pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, mencatat, dan mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil

1. Dialog Tatap Muka

Proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, diawali melalui mekanisme dialog tatap muka sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai tahapan paling krusial dalam tata kelola kolaboratif. Dialog tatap muka menjadi fondasi awal untuk membangun kepercayaan, saling pengertian, rasa saling menghormati, serta komitmen antar pemangku kepentingan. Proses ini sejalan dengan tahapan konsensus menurut (McMorris, Zanocco and Jones, 2018) Forum dialog dan pertemuan deliberatif diidentifikasi sebagai kegiatan penting dalam proses tata kelola kolaboratif karena menyediakan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi perspektif, menegosiasikan area kesepakatan, dan bersama-sama menciptakan solusi.

Pemerintah Kecamatan Bahodopi berperan aktif sebagai fasilitator dengan menyediakan ruang dialog formal yang mempertemukan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga teknis. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Dahran Manan selaku Kasi Ekonomi Kecamatan Bahodopi yang menyatakan, “*kalau dari kecamatan sendiri menyediakan forum diskusi untuk pertemuan berbagai pihak yang*

terkait seperti masyarakat, PT IMIP dan pemerintah untuk membahas langkah awal tentang proses kerjasama dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi." Temuan ini menunjukkan bahwa dialog tidak terjadi secara spontan, melainkan diinisiasi secara sadar oleh pemerintah sebagai otoritas lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Struktur dialog yang dibangun bersifat terbuka dan Partisipasi, di mana para pemangku kepentingan melakukan pertemuan langsung untuk membahas arah dan tujuan kerja sama pengelolaan sampah. Pihak-pihak yang secara konsisten terlibat dalam forum ini meliputi aktor pemerintah, aktor swasta, dan aktor masyarakat. Aktor pemerintah terdiri atas Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator utama, pemerintah desa sebagai representasi tingkat lokal, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga teknis. Aktor swasta diwakili oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang memiliki posisi strategis sebagai entitas industri besar sekaligus pihak yang berkontribusi terhadap dampak lingkungan. Sementara itu, aktor masyarakat meliputi tokoh masyarakat, perwakilan warga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta aktivis lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sampah.

Upaya peningkatan kualitas dialog juga dilakukan melalui transfer pengetahuan dengan menghadirkan narasumber dari daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan sampah, seperti Banyumas dan Bangli. Langkah ini menunjukkan adanya usaha sistematis dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkaya perspektif dan kapasitas para peserta dialog. Bapak Wawit Priyono selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa DLH telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah melalui pendekatan pembelajaran dari praktik terbaik daerah lain.

Meskipun dialog tatap muka telah berjalan, hasil penelitian juga menemukan adanya hambatan berupa perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah cenderung menekankan solusi jangka panjang melalui perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari sumber (tingkat hulu), sementara masyarakat lebih mengharapkan solusi yang bersifat praktis dan segera, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menangani tumpukan sampah yang sudah ada (tingkat hilir). Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan ideal jangka panjang dan kebutuhan praktis yang mendesak di lapangan.

Di sisi lain, PT IMIP sebagai aktor swasta memandang perbedaan pendapat tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam proses kolaborasi. Meskipun terdapat perbedaan perspektif, pihak perusahaan tetap menunjukkan komitmen untuk mendukung pengelolaan sampah melalui penyediaan dukungan pendanaan dan teknologi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka menjadi elemen kunci dalam membangun kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Meskipun dihadapkan pada tantangan berupa perbedaan kepentingan dan prioritas, komitmen bersama serta ruang dialog terbuka tetap menjadi faktor penentu keberlangsungan kolaborasi. Temuan ini sejalan dengan

prinsip *Green Economy Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan orientasi pada hasil dalam penyelesaian masalah lingkungan secara kolektif.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan muncul sebagai tema sentral dan prasyarat utama bagi keberhasilan proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Seluruh informan, tanpa memandang latar belakang sektoral, secara konsisten menegaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen perekat yang memungkinkan terbangunnya kerja sama yang tulus, efektif, dan berkelanjutan. Terdapat kesepahaman bersama bahwa kepercayaan dalam kolaborasi ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu transparansi dalam proses serta komitmen yang diwujudkan melalui tindakan nyata dari para aktor yang terlibat.

Konsep transparansi tidak hanya dimaknai secara prosedural, tetapi juga secara substantif, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran. Bagi masyarakat, transparansi memiliki arti yang sangat konkret, yakni keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran pengelolaan sampah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan dan mitra kolaborasi lainnya sangat bergantung pada sejauh mana informasi tersebut dapat diakses secara jelas dan terbuka. Hal ini ditegaskan oleh Kasi Ekonomi Kecamatan Bungku Timur yang menyatakan, *“tentunya untuk membangun kepercayaan itu yang paling utama itu transparansi dan juga komitmen, karena dari kami sendiri pemerintah kecamatan kalau untuk membangun kepercayaan kepada berbagai pihak yah itu kami lakukan transparansi dan juga komitmen.”*

Berdasarkan temuan lapangan, pengembangan kepercayaan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi sangat ditentukan oleh tingkat transparansi dan konsistensi komitmen seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah kecamatan dipandang sebagai aktor kunci karena perannya sebagai pembuat kebijakan sekaligus fasilitator kolaborasi, sehingga dituntut untuk bersikap terbuka, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun mitra lainnya. Transparansi terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan anggaran pengelolaan sampah, karena masyarakat perlu mengetahui besaran serta penggunaan dana publik untuk mempertahankan kepercayaan terhadap proses kolaborasi yang berjalan.

Selain transparansi, kepercayaan juga dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi regulasi serta efektivitas penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dan mitra kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika peraturan diterapkan secara jelas dan didukung oleh fasilitas yang memadai, interaksi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi lebih mudah diterima dan dipahami. Seluruh narasumber juga menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak bergantung pada satu aktor semata, melainkan pada komitmen kolektif semua pihak yang terlibat.

Kurangnya komitmen dari salah satu pihak berpotensi menghambat bahkan menggagalkan proses kolaborasi yang telah dibangun, sehingga kepercayaan harus terus dijaga sebagai fondasi utama kerja sama pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi termanifestasi secara nyata melalui tindakan konkret dan alokasi sumber daya sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing aktor. Komitmen ini tidak berhenti pada kehadiran dalam forum diskusi, melainkan diwujudkan dalam kontribusi aktif yang didorong oleh kesadaran kolektif terhadap urgensi dan skala permasalahan sampah yang telah mencapai tingkat kritis. Kesadaran tersebut menjadi motivasi utama bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk terlibat secara berkelanjutan dalam upaya pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis menunjukkan komitmennya melalui peran ganda sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor. Bentuk komitmen ini meliputi perumusan kebijakan dan regulasi daerah, penyusunan petunjuk teknis pemilahan dan pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, komitmen tersebut juga diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung yang signifikan, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS3R, penyediaan kontainer sampah di titik-titik strategis, serta pengadaan alat berat dan armada pengangkut sampah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Wawit Priyono selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan,

“kalau untuk bentuk komitmen dari kami sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup yah itu tadi seperti melalui peran regulator, fasilitator dan eksekutor... pertama itu pembuatan kebijakan dan regulasi terus juga pastinya penyediaan infrastruktur dan sarana seperti penyediaan TPA, TPST maupun TPS3R serta menyediakan bak kontainer sampah di titik titik strategis, dan masih banyak lagi yaitu pengadaan alat berat dan armada pengangkut sampah.” (Wawancara, Rabu 10 September 2025).

Di tingkat masyarakat, komitmen lahir dari dorongan yang bersifat personal dan komunal. Pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan yang dinilai kumuh akibat sampah yang berserakan menjadi pemicu emosional yang kuat bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Komitmen ini tidak muncul karena instruksi dari pihak tertentu, melainkan berasal dari keinginan otentik masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan mereka secara berkelanjutan.

Meskipun komitmen awal dari berbagai pihak terlihat kuat, hasil wawancara mengungkapkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan komitmen tersebut dalam jangka panjang. Tantangan utama tidak terletak pada keterbatasan anggaran atau infrastruktur, melainkan pada aspek sosial-kultural, khususnya perubahan pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah. Bapak Wawit Priyono menegaskan bahwa, *“yang pertama sih pola pikir dulu, pola pikir masing masing individu masyarakat, bagaimana sih tentang bagaimana sih mengolah sampah yang baik itu seperti apa, menumbuhkan kreatifitas dalam mengolah sampah itu seperti apa, kan banyak kreatifitas kreatifitas dalam mengelolah sampah yang bisa bernilai ekonomi sirkular.”*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat

menjadi kunci utama dalam keberhasilan jangka panjang pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Masyarakat perlu memahami pentingnya pengelolaan sampah yang benar, termasuk melalui upaya menumbuhkan kreativitas seperti daur ulang dan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat, mereka tidak hanya berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi sangat bergantung pada sinergi dan komitmen kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan melalui kebijakan, regulasi, dan penyediaan infrastruktur; PT IMIP berkontribusi melalui dukungan teknologi dan armada pengangkut sampah; sementara masyarakat berperan melalui partisipasi aktif serta perubahan pola pikir dalam mengelola sampah. Meskipun tantangan perilaku masyarakat masih menjadi hambatan utama, langkah-langkah kolaboratif yang telah dilakukan memberikan harapan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi dapat berkembang ke arah yang lebih baik, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi di masa mendatang.

4. Pemahaman Bersama

Temuan penelitian mengenai pemahaman bersama (*shared understanding*) dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi menunjukkan kondisi yang bersifat dualistik. Di satu sisi, terdapat kesepahaman yang relatif kuat di antara aktor-aktor yang terlibat secara aktif dan formal dalam proses kolaborasi, terutama terkait visi dan tujuan akhir kerja sama. Namun, di sisi lain, pemahaman tersebut mengalami pelemahan ketika menjangkau masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi yang cukup signifikan antara aktor kolaborasi dan masyarakat umum.

Informan yang mewakili unsur pemerintah dan masyarakat yang terlibat aktif dalam kolaborasi menyatakan adanya kesamaan pemahaman mengenai tujuan pengelolaan sampah. Tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dipandang sebagai kepentingan bersama yang menjadi dasar keterlibatan seluruh aktor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dahlan Manan selaku Kasi Ekonomi Kecamatan Bahodopi yang menyatakan, *“iyah, saya rasa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah sampah saat ini, karena yang pastinya pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.”*

Namun demikian, narasi optimis tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan lapangan yang diperoleh dari informan PT IMIP dan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengalaman mereka, masih terdapat tingkat apatisme yang cukup tinggi di kalangan masyarakat umum terhadap isu pengelolaan sampah. Kondisi ini tercermin dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, meskipun fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah disediakan

di setiap desa. Perilaku tersebut menjadi bukti empiris bahwa pemahaman bersama belum sepenuhnya terinternalisasi pada tingkat akar rumput. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Arifin selaku perwakilan PT IMIP yang menyatakan,

“yah tidak semua pihak di kecamatan itu memiliki pemahaman yang sama tentang pengelolaan sampah... nyatanya kebanyakan masyarakat Bahodopi itu masih tidak peduli dengan masalah sampah hari ini, padahal kan sudah jelas dilakukannya kolaborasi ini untuk mengatasi masalah sampah tapi sampai sekarang banyak masyarakat yang tidak peduli... masih banyak sampah hari ini yang berserakan di pinggir jalan dan di lahan kosong padahal sudah disediakan TPS di tiap-tiap desa tapi masih banyak yang membuang sampah sembarangan, di sini kan sudah terbukti bahwa tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama.” (Wawancara, Kamis 11 September 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan di tingkat aktor kolaborasi, pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Bahodopi. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh paradigma yang keliru mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tugas pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyedia layanan publik, sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pandangan ini berkontribusi terhadap rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah meskipun sarana pendukung telah tersedia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi memiliki tujuan bersama yang disepakati oleh berbagai pihak, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, tantangan utama kolaborasi terletak pada belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi yang berkelanjutan serta perubahan pola pikir masyarakat mengenai tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah. Tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, proses kolaborasi yang telah dibangun berpotensi tidak berjalan secara optimal.

5. Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*)

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi telah menghasilkan sejumlah capaian awal atau *kemenangan kecil (intermediate outcomes)*. Hasil-hasil ini memang belum menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh, namun berperan penting sebagai pemicu momentum kolaborasi, penguat kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta bukti bahwa kemajuan konkret dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor.

Salah satu capaian awal yang paling menonjol berada pada ranah sosial, yakni meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kecamatan mencatat adanya perubahan perilaku awal masyarakat, seperti meningkatnya kemauan warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Partisipasi ini menunjukkan dimensi gender yang kuat, di mana perempuan, khususnya ibu-ibu, muncul sebagai agen perubahan utama di tingkat komunitas. Mereka menjadi motor penggerak berbagai inisiatif berbasis masyarakat seperti Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) dan bank sampah. Keberhasilan pendirian satu bank sampah induk dan sebelas bank sampah unit menjadi capaian signifikan yang tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wawit Priyono selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan,

“alhamdulillah melihat perkembangan sekarang dengan adanya pemerhati sampah kemudian KSM-KSM ada ibu-ibu juga yang melaksanakan kegiatan ini, mereka untuk mengelola sampah sudah semakin meningkat kalau di daerah Bahodopi yah itu rata-rata perempuan banyak yang melakukan kegiatan itu, itu contohnya di lahan Sidaya itu ibu-ibu, jadi sampah bisa memberikan kontribusi tambahan bernilai ekonomis.” (Wawancara, Rabu 10 September 2025).

Di tengah narasi keberhasilan tersebut, penelitian ini juga menemukan temuan tandingan yang bersifat kritis, terutama dari perspektif masyarakat terkait pelaksanaan layanan dasar pengelolaan sampah. Temuan lapangan menunjukkan adanya permasalahan serius pada aspek pengangkutan sampah. Informan masyarakat mengungkapkan bahwa masih terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan, lahan kosong, dan aliran sungai yang dibiarkan tidak terangkut selama berbulan-bulan hingga mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan. Bapak Alam selaku masyarakat Kecamatan Bahodopi mengungkapkan kondisi tersebut dengan menyatakan,

“kalau untuk hasil awal pertama sudah ada TPS3R, terus ada juga mesin insinerator, cuman yang belum ada ini TPA-nya, tapi yang jadi masalah ini masih banyak sampah di pinggir jalan, di lahan kosong sama di aliran sungai, bahkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan itu mencapai dua meter baru berbulan-bulan tidak diangkut oleh pekerja pengangkut sampah, hal ini yang menjadi masalah serius, kalau untuk kerja sama mungkin sudah terlaksana cuman pengeksekusiannya yang masih sangat kurang soalnya masih banyak sampah yang berserakan di bahu-bahu jalan.” (Wawancara, Selasa 16 September 2025).

Secara umum, hasil awal kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi menunjukkan adanya capaian positif sekaligus permasalahan mendasar pada tingkat implementasi. Kolaborasi ini telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, yang diperkuat oleh peran aktif KSM serta keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang memberikan nilai tambah ekonomi. Kontribusi sektor swasta, khususnya PT IMIP, terlihat melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti truk pengangkut sampah dan mesin insinerator untuk mengurangi volume sampah residu. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan langkah strategis berupa rencana penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 25 hektar yang saat ini masih berada pada tahap pembebasan lahan.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa capaian tersebut belum berdampak optimal karena lemahnya pelaksanaan teknis di tingkat operasional, khususnya pada sistem pengangkutan sampah. Penumpukan sampah yang tidak tertangani secara rutin berpotensi meniadakan dampak positif dari keberhasilan kolaborasi yang telah dicapai. Temuan ini menegaskan adanya kontradiksi dalam proses kolaborasi di Kecamatan Bahodopi, di mana pada level strategis kolaborasi berhasil membangun dialog, komitmen, dan inisiatif inovatif

seperti bank sampah, tetapi pada level operasional yang paling mendasar masih mengalami kegagalan. Kondisi ini berisiko menghambat efektivitas serta mengancam keberlanjutan seluruh upaya kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi.

Pembahasan

1. Dialog Tatap Muka

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa dialog tatap muka merupakan fondasi awal dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Inisiasi dialog oleh Pemerintah Kecamatan menunjukkan peran pemerintah sebagai *driver* utama dalam membangun kolaborasi lintas aktor. Temuan ini sejalan dengan kerangka *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan *face-to-face dialogue* sebagai tahap awal yang krusial untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Forum dialog yang difasilitasi pemerintah berfungsi sebagai arena institusional yang terlegitimasi, sehingga memungkinkan proses deliberatif berlangsung secara terbuka dan terstruktur.

Struktur dialog yang inklusif dengan melibatkan aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mencerminkan esensi pendekatan *governance* yang menekankan kolaborasi lintas sektor. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian ini, keberagaman aktor tidak hanya menjadi modal sosial, tetapi juga menghadirkan kompleksitas berupa perbedaan kapasitas dan pengetahuan. Peran DLH sebagai *knowledge broker* dengan menghadirkan praktisi dari Banyumas dan Bangli memperlihatkan upaya sadar untuk mengatasi asimetri informasi. Hal ini memperkuat argumen (Martikalini *et al.*, 2025) yang menekankan bahwa Pembelajaran kebijakan merupakan elemen kunci dalam memperkuat tata kelola kolaboratif, karena menciptakan pemahaman bersama di antara para aktor dan memungkinkan mekanisme pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung kolaborasi efektif dalam layanan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa arena dialog tidak terlepas dari konflik, khususnya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait pendekatan hulu dan hilir dalam pengelolaan sampah. Ketegangan ini merepresentasikan perbedaan prioritas dan horison waktu antar aktor, di mana pemerintah cenderung mendorong solusi jangka panjang yang bersifat preventif, sementara masyarakat menuntut solusi cepat dan konkret. Kondisi ini memperkuat temuan (Torfining *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa Konflik merupakan ciri inti dan berulang dari proses tata kelola kolaboratif. Alih-alih hanya bersifat mengganggu, konflik dapat muncul ketika berbagai pemangku kepentingan dengan prioritas dan pandangan dunia yang beragam berinteraksi, terutama dalam isu-isu kebijakan publik yang kompleks seperti tata kelola lingkungan.

Pandangan PT IMIP yang menilai dialog berjalan tanpa hambatan mengungkap dinamika kekuasaan yang subtil dalam proses kolaborasi. Sebagai aktor dengan

sumber daya finansial dan teknologi yang kuat, PT IMIP berada pada posisi yang relatif lebih stabil dibandingkan masyarakat dan pemerintah lokal. Perbedaan persepsi ini menegaskan bahwa ketimpangan sumber daya dapat memengaruhi cara aktor memaknai proses dialog. Jika dinamika ini tidak dikelola dengan baik, maka dialog berisiko menjadi prosedural dan kurang transformatif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menguatkan literatur *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sensitivitas terhadap relasi kuasa dan persepsi antar aktor agar kolaborasi tidak hanya berkelanjutan secara formal, tetapi juga substantif dalam menyelesaikan masalah publik.

2. Membangun Kepercayaan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan elemen fundamental yang berfungsi sebagai perekat utama dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Seluruh informan secara konsisten mengidentifikasi kepercayaan sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kolaborasi. Temuan ini mengafirmasi pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menempatkan kepercayaan sebagai inti dari proses kolaboratif, karena tanpa adanya kepercayaan, aktor cenderung enggan berbagi sumber daya, informasi, dan komitmen jangka panjang.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kepercayaan di Bahodopi dibangun melalui dua pilar utama, yaitu transparansi dan komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Transparansi diposisikan oleh pemerintah sebagai strategi membangun kepercayaan, namun temuan penelitian mengungkap adanya perbedaan pemaknaan antar aktor. Bagi pemerintah, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan prosedural dalam pengambilan keputusan, sementara bagi masyarakat transparansi dimaknai secara lebih substantif melalui keterbukaan anggaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi tidak cukup dibangun melalui mekanisme Partisipasi formal, tetapi menuntut akuntabilitas yang dapat diverifikasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Fataruba, 2025) yang menegaskan bahwa dalam tata kelola kolaboratif, transparansi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, karena keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban memperkuat legitimasi proses serta mengurangi ketidakpastian tentang peran dan sumber daya masing-masing aktor.

Pilar kedua, yaitu komitmen yang dibuktikan melalui implementasi kebijakan dan penyediaan sarana prasarana, menegaskan bahwa kepercayaan bersifat dinamis dan akumulatif, bukan kondisi yang terbentuk sekali lalu bertahan secara otomatis. Pernyataan DLH bahwa kepercayaan dibangun melalui penerapan regulasi yang konsisten dan fasilitas yang berfungsi dengan baik menunjukkan bahwa kepercayaan harus terus “diproduksi ulang” melalui kinerja nyata. Temuan ini memperkuat argumen (Setiono and Kustulasari, 2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat terhambat oleh kegagalan dalam implementasi operasional dan pemenuhan komitmen. Ketika janji kolektif tidak dipenuhi atau tindakan tidak konsisten dilakukan oleh pemangku kepentingan, kepercayaan yang telah dibangun

dapat terkikis, sehingga menghambat proses kolaboratif secara keseluruhan.

Sentralitas peran pemerintah dalam menjaga dan memelihara kepercayaan merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai pemegang otoritas dan fasilitator kolaborasi. Namun, temuan bahwa PT IMIP dan masyarakat memandang kepercayaan sebagai tanggung jawab bersama menunjukkan adanya pergeseran menuju pemahaman kolaboratif yang lebih matang. Perspektif ini mencerminkan kesadaran akan interdependensi antar aktor, di mana keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada satu aktor dominan, tetapi pada integritas dan konsistensi seluruh pihak yang terlibat. Meski demikian, kondisi kepercayaan di Bahodopi masih bersifat rapuh dan sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk memenuhi ekspektasi, khususnya terkait penyediaan layanan dasar. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh praktik kepercayaan yang terus diuji dalam implementasi sehari-hari.

3. Komitmen Terhadap Proses

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi termanifestasi secara konkret melalui alokasi sumber daya yang spesifik dan saling melengkapi. Pola ini mencerminkan karakteristik utama *collaborative governance*, di mana setiap aktor berkontribusi sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan mandat institusionalnya. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Siregar and Pane, 2025) yang menegaskan bahwa Komitmen dalam tata kelola kolaboratif tidak hanya ditunjukkan melalui partisipasi simbolis, tetapi juga melalui investasi nyata berupa waktu, upaya, dan sumber daya dari para pemangku kepentingan. Komitmen substantif ini sangat penting untuk beralih dari retorika ke tindakan dan merupakan faktor kunci yang memengaruhi kredibilitas dan keberlanjutan proses kolaboratif.

Peran pemerintah daerah, khususnya Kecamatan dan DLH, menunjukkan bentuk komitmen berbasis otoritas publik. Pemerintah memanfaatkan kewenangannya dalam penyusunan regulasi, kebijakan teknis, serta penyediaan aset dasar berupa lahan untuk TPA. Upaya penyediaan lahan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis yang tidak dapat digantikan oleh aktor lain, terutama dalam aspek tata ruang dan legalitas. Komitmen DLH yang berfungsi secara simultan sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana mencerminkan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kolaborasi. Kondisi ini memperkuat kerangka (Zia Ud Din *et al.*, 2023) Tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh pembangunan kapasitas kelembagaan, karena kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas organisasi yang kuat mendukung kolaborasi berkelanjutan, meningkatkan hasil penyampaian layanan, dan memperkuat kepercayaan serta partisipasi pemangku kepentingan dari waktu ke waktu.

Komitmen sektor swasta, dalam hal ini PT IMIP, diwujudkan melalui program

CSR berupa penyediaan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah, seperti mesin insinerator dan armada truk. Kontribusi ini menunjukkan bagaimana sumber daya privat dapat dimobilisasi untuk mengisi keterbatasan kapasitas fiskal dan teknologi pemerintah daerah. Temuan ini selaras dengan kajian (Alhosani, 2025) yang menyatakan bahwa Kemitraan publik-swasta (PPP) menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan sumber daya keuangan, keahlian teknis, dan kapasitas operasional aktor sektor swasta dengan mandat regulasi dan publik pemerintah dalam memberikan layanan publik dan infrastruktur. Pengaturan ini memanfaatkan sumber daya dan inovasi yang saling melengkapi dari aktor swasta untuk mendukung tujuan publik, khususnya di bidang layanan yang kompleks seperti pengelolaan limbah dan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.

Berbeda dengan aktor institusional, komitmen masyarakat bersumber dari dorongan yang bersifat eksistensial, yaitu keinginan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat lahir dari pengalaman langsung terhadap dampak buruk sampah, sehingga menjadi bentuk *social commitment* yang bernilai tinggi bagi kolaborasi. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap tantangan mendasar terkait keberlanjutan komitmen dalam jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Pernyataan DLH mengenai tantangan *mindset* menunjukkan bahwa kolaborasi ini telah berhasil memobilisasi sumber daya fisik dan finansial, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan sosial kultural.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur keras (TPA, insinerator, armada angkut), tetapi juga oleh keberhasilan membangun infrastruktur lunak berupa nilai, norma, dan perilaku pro-lingkungan. Tanpa internalisasi komitmen di tingkat individu, komitmen aktor institusional berisiko tidak berkelanjutan dan terus berhadapan dengan rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan kolaborasi di Bahodopi mensyaratkan strategi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan sumber daya, tetapi juga pada transformasi kesadaran dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

4. Pemahaman Bersama

Temuan penelitian pada indikator pemahaman bersama (*shared understanding*) mengungkap paradoks mendasar dalam praktik *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Di tingkat aktor yang aktif terlibat dalam forum dialog, tampak adanya konsensus yang kuat mengenai tujuan kolaborasi, yakni mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Konsensus ini terbentuk melalui interaksi intensif antar perwakilan pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam ruang dialog yang terstruktur. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menegaskan bahwa dialog tatap muka berfungsi sebagai forum interaksi langsung yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi perspektif, menyelaraskan visi, dan menumbuhkan saling pengertian, yang sangat penting untuk mempertahankan proses tata kelola kolaboratif (Orgita, Taufiq and Rupiarsieh, 2024).

Namun demikian, temuan tandingan dari DLH dan PT IMIP mematahkan asumsi bahwa pemahaman bersama tersebut telah mengakar secara luas. Realitas di tingkat akar rumput menunjukkan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Hal ini menandakan terjadinya disonansi antara pemahaman di tingkat elit kolaborasi dan praktik di tingkat publik. Fenomena ini menguatkan kerangka (Adji *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa Komunikasi yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan di luar negosiasi formal sangat penting dalam tata kelola kolaboratif untuk memastikan bahwa tujuan bersama diinternalisasi, dipahami, dan dimiliki oleh komunitas yang lebih luas. Proses sosialisasi inklusif ini mencegah konsensus yang dangkal dan mendorong kepemilikan kolektif atas hasil kolaborasi.

Analisis DLH yang mengidentifikasi paradigma masyarakat yang memandang sampah sebagai tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa hambatan utama bukan semata kurangnya informasi, melainkan persoalan kultural yang telah mengakar. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai penerima layanan pasif, bukan sebagai mitra aktif dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif. Temuan ini sejalan dengan kajian (Kader and Fahri, 2025) yang menegaskan bahwa Pengaturan tata kelola kolaboratif sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan nilai, norma, dan harapan di antara para pemangku kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menciptakan ketegangan kelembagaan dan menghambat kolaborasi yang bermakna ketika para aktor tidak mampu menyelaraskan orientasi sosial dan budaya mereka dalam proses tersebut.

Kesenjangan pemahaman bersama ini memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan kolaborasi di Bahodopi. Infrastruktur fisik dan program teknis yang telah disepakati berpotensi tidak optimal jika tidak didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab publik yang luas. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan paling fundamental dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Bahodopi bukan lagi pada pembentukan forum atau kesepakatan elit, melainkan pada mentransformasikan pemahaman bersama yang terbatas menjadi etos kolektif di tingkat komunitas. Tanpa jembatan yang efektif antara ruang rapat dan ruang publik, *collaborative governance* berisiko menjadi proyek elitis yang terisolasi dan gagal menghasilkan dampak transformatif yang berkelanjutan.

5. Hasil Antara

Temuan penelitian pada bagian hasil antara (*intermediate outcomes*) menunjukkan adanya paradoks antara kemenangan strategis dan kegagalan operasional dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi. Berbagai capaian awal, seperti meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat, munculnya inisiatif bank sampah yang dimotori oleh perempuan, serta kontribusi infrastruktur dari PT IMIP, merepresentasikan keberhasilan penting pada tahap awal kolaborasi. Dalam kerangka *collaborative governance*, hasil-hasil antara semacam ini memiliki

fungsi strategis sebagai *confidence-building measures* yang menjaga momentum kolaborasi dan memperkuat keyakinan bahwa kerja sama lintas aktor dapat menghasilkan manfaat nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan (Ansell and Gash, 2008) yang menekankan bahwa dalam proses tata kelola kolaboratif, pencapaian awal atau 'kemenangan kecil' berfungsi sebagai hasil antara yang membantu membangun kepercayaan, memperdalam komitmen, dan memperkuat pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan. Keberhasilan awal ini dapat menghasilkan momentum positif dan mencegah stagnasi pada tahap awal kolaborasi.

Keberhasilan bank sampah dan KSM juga menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya menghasilkan dampak lingkungan, tetapi berpotensi menciptakan nilai sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Keterlibatan aktif perempuan sebagai penggerak bank sampah mengindikasikan adanya dinamika pemberdayaan sosial yang signifikan, di mana isu lingkungan menjadi pintu masuk bagi penguatan peran sosial dan ekonomi kelompok masyarakat. Temuan ini memperkuat (Utami, Adiando and Mayarni, 2022) yang menempatkan *Intermediate outcomes* (hasil antara) merupakan langkah-langkah penting dalam proses kolaborasi yang mencerminkan kemajuan nyata selama pelaksanaan kolaboratif sebelum mencapai tujuan akhir. *Intermediate outcomes* membantu mengevaluasi proses dan menunjukkan apakah kolaborasi mampu menciptakan nilai publik yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian teknis semata.

Namun demikian, seluruh capaian strategis tersebut dibayangi oleh temuan tandingan yang sangat krusial, yaitu kegagalan pada level operasional paling dasar: sistem pengangkutan sampah. Kesaksian masyarakat mengenai tumpukan sampah yang tidak terangkut selama berbulan-bulan menunjukkan adanya diskoneksi serius antara perencanaan kolaboratif dan implementasi di lapangan. Fenomena ini menciptakan kontradiksi tajam, di mana kolaborasi tampak berhasil pada level dialog, inovasi, dan kemitraan, tetapi gagal menjalankan fungsi rutin yang paling esensial. Kondisi ini menguatkan temuan (Afrijal *et al.*, 2025) yang menegaskan bahwa Tantangan utama yang diamati dalam tata kelola kolaboratif bukanlah pada fase perancangan atau komitmen, tetapi selama implementasi operasional, di mana mekanisme koordinasi yang lemah, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan peran serta tanggung jawab yang tidak jelas di antara para pemangku kepentingan dapat secara signifikan mengurangi efektivitas dan keberlanjutan upaya kolaboratif.

Kegagalan operasional pengangkutan sampah memiliki implikasi sistemik terhadap keseluruhan proses kolaborasi. Pertama, kegagalan ini secara langsung menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aktor kolaborasi lainnya. Kedua, kegagalan tersebut mendelegitimasi tujuan bersama yang telah disepakati, karena realitas di lapangan bertolak belakang dengan narasi lingkungan bersih dan sehat yang dibangun dalam forum dialog. Ketiga, kegagalan ini berpotensi melemahkan komitmen masyarakat, terutama dalam praktik pemilahan sampah, karena upaya yang dilakukan tidak diikuti oleh layanan dasar yang memadai. Dengan demikian, kegagalan operasional tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis

semata, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan *collaborative governance* secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh inovasi, kemitraan strategis, atau pengadaan teknologi, tetapi sangat bergantung pada keandalan sistem operasional harian. Jurang antara perencanaan strategis dan eksekusi lapangan yang terjadi di Bahodopi menunjukkan bahwa tanpa fondasi operasional yang kuat, hasil-hasil antara yang positif berisiko kehilangan makna dan daya transformasinya. Oleh karena itu, keberlanjutan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi mensyaratkan penyeimbangan antara agenda strategis dan kapasitas operasional, agar kolaborasi tidak runtuh di bawah beban kegagalan implementasinya sendiri.

Kesimpulan

Proses *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, secara umum telah menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan adanya implementasi kerangka Ansell dan Gash (2008) yang terjadi di tingkat formal dan strategis, dengan derajat keberhasilan yang bervariasi antar-indikator. Teori *Collaborative governance* Ansell and Gash (2008) yang menekankan lima indikator (Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara) telah berfungsi sebagai kerangka yang valid untuk menganalisis dinamika hubungan antara Pemerintah (Kecamatan dan DLH), Swasta (PT IMIP), dan Masyarakat.

Dari kelima indikator tersebut, tiga indikator telah menunjukkan kondisi yang optimal dan menjadi fondasi yang kuat bagi kolaborasi, Dialog Tatap Muka: pemerintah kecamatan berhasil menciptakan forum yang inklusif, memungkinkan negosiasi kepentingan antara pemerintah swasta dan masyarakat. Membangun Kepercayaan: Kepercayaan telah berhasil dibangun melalui transparansi anggaran. Komitmen Terhadap Proses: Setiap aktor menunjukkan komitmen yang sinergis sesuai kapasitas. dan Ada dua indikator belum optimal dan menjadi sumber kerapuhan kolaborasi: Pemahaman Bersama: Terjadi pernyataan yang bertentangan di kalangan para aktor inti. Hasil Antara: Belum optimal dan berada dalam kondisi krisis. Meskipun ada keberhasilan kecil seperti bank sampah dan instalasi incinerator, pencapaian ini dinilai gagal karena dibayangi oleh kegagalan fatal sistem pengangkutan sampah yang macet total, menyebabkan tumpukan sampah berserakan selama berbulan-bulan.

Kesimpulannya, *Collaborative governance* di Bahodopi berhasil pada aspek input dan process (terutama Dialog, Kepercayaan, dan Komitmen), tetapi menunjukkan jurang yang dalam antara Strategi dan Operasi (Eksekusi), yang tercermin dalam indikator Pemahaman Bersama dan Hasil Antara. Tanpa perbaikan mendasar pada eksekusi layanan dasar dan transformasi paradigma publik, kolaborasi ini terancam gagal secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Mahfuzat selaku Pembimbing I dan Ibu Rusmawaty Rusdin selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan, kesabaran, serta dedikasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

Referensi

- Adji, I. *et al.* (2023) "Collaborative Governance in the Management of Transportation Modes in DKI Jakarta Province," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), p. 747. Available at: <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.56440>.
- Afrijal *et al.* (2025) "Collaborative Governance: Strategies for Addressing Challenges and Opportunities in MSME Development," *Journal of Public Administration Review*, 3(1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5039>.
- Alhosani, K. (2025) "Leveraging Public–Private Partnerships for a Circular Industry Economy: Advancing Economic Sustainability in Industrial Waste Management in the Emirate of Ajman, UAE," *Challenges*, 16(3), p. 31. Available at: <https://doi.org/10.3390/challe16030031>.
- Ansell, C. and Gash, A. (2008) "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Bodin, Ö. (2017) "Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems," *Science*, 357(6352), p. eaan1114. Available at: <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>.
- Bryson, J.M., Crosby, B.C. and Stone, M.M. (2015) "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging," *Public Administration Review*, 75(5), pp. 647–663. Available at: <https://doi.org/10.1111/puar.12432>.
- Chen, C. and Neshkova, M.I. (2020) "The effect of fiscal transparency on corruption: A panel cross-country analysis," *Public Administration*, 98(1), pp. 226–243. Available at: <https://doi.org/10.1111/padm.12620>.
- Dudley, S.E. and Xie, Z. (2020) "Designing a Choice Architecture for Regulators," *Public Administration Review*, 80(1), pp. 151–156. Available at: <https://doi.org/10.1111/puar.13112>.
- Fataruba, M. (2025) "Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Sosial dan humaniora*, 1(4), pp. 1561–1576. Available at: <https://doi.org/10.63822/6w73m997>.
- Hall, J.L. (2021) "Through the Editor's Lens: Understanding the Editorial Role Through Metaphor," *Public Administration Review*, 81(2), pp. 185–190. Available at: <https://doi.org/10.1111/puar.13377>.
- Jambeck, J.R. *et al.* (2015) "Plastic waste inputs from land into the ocean," *Science*, 347(6223), pp. 768–771. Available at: <https://doi.org/10.1126/science.1260352>.
- Kader, A. and Fahri, R. (2025) "Assessing the Challenges and Opportunities of

- Collaborative Governance in Multi-Stakeholder Policy Environments,” *Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri*, 16(1), pp. 32–40. Available at: <https://doi.org/10.21771/jrtpi.2025.v16.no1.p32-40>.
- Martikalini, C. *et al.* (2025) “Policy Learning as a Strategy to Strengthen Collaborative Governance in Public Services: Theoretical and Practical Perspectives,” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 17(1), pp. 88–109. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i1.45738>.
- McMorris, C., Zanooco, C. and Jones, M. (2018) “Policy Narratives and Policy Outcomes: An NPF Examination of Oregon’s Ballot Measure 97,” *Policy Studies Journal*, 46(4), pp. 771–797. Available at: <https://doi.org/10.1111/psj.12263>.
- Mukus, P., Amaliatulwalidain and Kariem, M.Q. (2023) “Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022,” *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), pp. 116–123. Available at: <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.442>.
- Orgita, N.I., Taufiq, A. and Rupiarsieh (2024) “Collaborative Governancedalam Mewujudkan Thengul Sebagai CityBrandingKabupaten Bojonegoro,” *REFORMASI*, 14(2), pp. 232–242. Available at: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.5543>.
- Pundenswari, P. *et al.* (2023) “GREEN ECONOMY COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GARUT,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), pp. 454–471. Available at: <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3344>.
- Puspita, T.A. and Wahyudi, K.E. (2023) “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), pp. 284–290. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.625>.
- Roberts, A. (2019) “Diversity, trust, and social learning in collaborative governance,” *Public Administration Review*, 79(3), pp. 452–454. Available at: <https://doi.org/10.1111/puar.13061>.
- Setiono, D.P. and Kustulasari, A. (2025) “Making Collaboration Work: A Systematic Multidimensional Review of Collaborative Governance,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(15), pp. 270–285. Available at: <https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.15371>.
- Siregar, A.T.R. and Pane, R.P. (2025) “COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REVITALISASI KAWASAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023,” *JOM FISIP*, 12(1), pp. 1–13.
- Torring, J. *et al.* (2025) “A systematic review of conflict within collaborative governance,” *Policy & Politics*, pp. 1–24. Available at: <https://doi.org/10.1332/03055736Y2025D000000070>.
- Utami, A.T., Adianto, A. and Mayarni, M. (2022) “Collaborative Governance Process in Supporting Smart Living in Pekanbaru City,” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), pp. 215–233. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21371>.
- Wang, L. *et al.* (2020) “A novel substitution-based method for effective leaching of chromium (III) from chromium-tanned leather waste: The thermodynamics, kinetics and mechanism studies,” *Waste Management*, 103, pp. 276–284. Available

at: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.12.039>.

Zia Ud Din, M. *et al.* (2023) "Correction: Linking local collaborative governance and public service delivery: mediating role of institutional capacity building," *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), p. 963. Available at: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02505-0>.